

## RUNTUHNYA ‘MANTRA’ SURVEY : SEBUAH KETERBATASAN METODOLOGIS ?

Lukman Nurhakim

Mahasiswa Program Pascasarjana Komunikasi Politik -Universitas Paramadina Jakarta  
Email : lukmanenha1984@gmail.com

### ABSTRAK

Kecenderungan arah politik konstituen umumnya memang dijajaki dengan metode survey. Survey menjadi instrumen metodologis yang hingga kini dipakai untuk mencoba membaca hati massa dalam populasi yang besar. Survey terhadap sampel yang diambil dari populasi , secara metodologis masih dianggap representatif. Namun, fakta empiris bisa menampilkan realitas yang sama sekali berbeda apa yang diprediksikan oleh hasil jajak pendapat itu. Boleh jadi metode ini jika dihadapkan realitas paradoksal pada berbagai kasus rekrutmen kepala daerah menjadi metode yang gagal. Namun, kiranya patut dicurigai juga betapa kecenderungan arah politik manusia itu bersifat dinamis. Maka hasil kajian pada kurun waktu tertentu, bisa saja berbeda hasilnya dengan kajian pada waktu yang lain, dan bahkan hingga hari H kontestasi.

**Kata kunci** : Survey, metode, keterbatasan.

### PENDAHULUAN

Angka elektabilitas menjadi semacam mantra sakti yang sanggup mengantarkan seorang *public figure* menggapai segala ambisi politiknya. Pemilik angka keterpilihan (elektabilitas) tinggi akan menjelma menjadi selebritis politik dalam sekejap. Seakan tidak perlu lagi diuji kemampuannya. Seorang politisi yang memiliki elektabilitas yang tinggi dipandang sudah separuh lebih menguasai ilmu politik. Dipinang partai politik, didekati para “pemodal” yang sanggup membiayainya dalam kompetisi politik.

Seorang politisi yang bertarung dengan modal angka elektabilitas tinggi hampir dipastikan bisa memenangkan pertarungan perebutan kekuasaan. Hembusan informasi oleh media akan mempengaruhi benak publik bahwa politisi dengan elektabilitas tinggi makin meyakinkan publik akan memenangkan pertarungan politik. Sekaligus mempengaruhi psikologis lawannya menjadi putus asa dan mengendurkan semangat perlawanan terhadap pemilik elektabilitas tinggi berdasarkan hasil survey.

### METODE

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan, mengingat masalah yang diteliti adalah menyangkut diskursus sosial politik seperti elektabilitas, popularitas dan citra politik yang telah dimediasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis disriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan karena penelitian ini bertolak dari realitas empirik yang telah dijadikan teks yang berlaku sebagai data primer. Metode kualitatif yaitu tata cara penelitian yang dipusatkan untuk memperoleh data deskriptif.

## DISKUSI

### Fenomena Pilgub Jabar, Jateng DKI Jakarta

Tapi belakangan, sejumlah politisi ternyata berhasil “melawan” bahkan membungkam hitungan hasil survey. Hasil akhir kontestasi politik ternyata tidak sesuai dengan hasil survey. Anomali tersebut terjadi dalam Pilgub Jabar dan Pilgub Jateng pada tahun 2018 lalu. Beberapa Lembaga survey menulis bahwa pasangan Sudrajat-Syaikhu diprediksi hanya akan meraih suara di bawah 10 persen, ternyata hasil akhirnya mengejutkan. Pasangan Sudrajat-Syaikhu berhasil finish dengan hasil akhir meraih 28 persen suara.

Pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah juga mengejutkan publik dan Lembaga survey. Selalu diprediksi hanya mendapat suara 15 persen, ternyata berhasil merebut suara hingga 41 persen. Meski pasangan ini dikalahkan Ganjar-Taj Yasin, tapi setidaknya menjungkirkan prediksi lembaga survey yang biasanya hampir dipastikan tidak meleset. Kondisi mengejutkan diawali di Amerika sebagai kiblat dan lahirnya lembaga survey politik. Donald Trump menjungkirkan segala prediksi dan perhitungan lembaga survey politik pada Pilpres AS tahun 2016 lalu.

Menanggapi hasil akhir Pilgub di Jabar dan Jateng, para pakar dan pelaku survey politik mengemukakan bahwa apa yang dilakukan pasangan Sudrajat-Syaikhu di Jabar dan Sudirman-Ida Fauziyah di Jateng sebagai keberhasilan melakukan mobilisasi dukungan di seminggu terakhir menjelang pemilihan. Juga berhasil merebut suara mengambang (*swing voters*) dan suara yang belum memutuskan memilih (*undecided voters*).

Kasus berbeda dan menarik untuk dipelajari dari perspektif psikologi komunikasi adalah kasus Pilgub DKI Jakarta. Suasana psikologis publik Jakarta terpengaruh dengan beragam “pertunjukan” sebelum digelarnya Pilkada. Didominasi oleh aksi massa yang bernuansa agama dengan aksi kelompok yang mengecam pernyataan Gubernur Ahok yang kemudian disebut sebagai kasus penistaan agama. Aksi penentangan tersebut dilakukan oleh para tokoh agama sehingga memperkuat pandangan publik bahwa apa yang disampaikan oleh Gubernur Ahok benar-benar suatu penistaan agama hingga berujung di Pengadilan.

Publik terbelah. Antara yang berpegang pada pandangan perspektif hukum positif dan hukum agama. Kemudian bermuara pada hasil akhir Pengadilan sebagai dasar legitimasi argumentasi politis. Rangkaian peristiwa tersebut mempengaruhi preferensi pilihan politik publik. Beragam aksi dan “pertunjukan” menjelang Pilgub mempengaruhi sisi emosi publik. Akhirnya, Pilgub DKI Jakarta dimenangkan pasangan Anis Baswedan-Sandiaga Uno yang lagi-lagi awalnya diprediksi lembaga survey tidak akan bisa mengalahkan Ahok.

### Kritik terhadap Lembaga Survey

Makin banyaknya kasus hasil akhir survey yang berbanding terbalik dengan perolehan suara dalam pilkada mendorong menguatnya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga survey. Padahal setiap lembaga survey melakukan proses yang terukur dan ilmiah dalam proses survey. Akhirnya muncul tuduhan bahwa lembaga survey tidak ilmiah, partisan dan “menghalal” segala acara agar angka hasil survey memuaskan pihak yang “membayar” lembaga survey. Akhirnya, beragam hasil survey tidak lagi dipercayai. Terlihat dari makin banyaknya komentar negatif dalam media sosial terhadap hasil survey. Kondisi ini makin menguat menjelang pemilu 2019.

Beragam kasus hasil survey yang meleset di pilkada 2018 mempengaruhi psikologi dan keyakinan publik. Bahwa lembaga survey tidak profesional, memuaskan yang membayar

hingga dituding sebagai upaya untuk menggiring opini publik. Kondisi ini menurut penulis terjadi karena beberapa hal, di antaranya:

## ***a. Survey-tainment***

Lembaga survey sebagai lembaga riset yang bekerja secara ilmiah menjelma menjadi lembaga yang berlomba-lomba ingin terkenal dan memaksimalkan publisitas. Hasil survey seakan wajib dipublikasikan meluas oleh semua media. Padahal akan selalu ada resiko dibalik tingginya publisitas media. Sebab akan makin banyak penilaian yang beragam. Padahal seharusnya Lembaga survey menjadi lembaga tink-tank, bukan bagian dari kampanye. Seharusnya bekerja dalam senyap.

## ***-Tidak Transparan***

Lembaga survey di Indonesia pada umumnya tidak mendeklarasikan diri bahwa apa yang disurvei apakah independen atau bekerja karena pesanan pihak tertentu. Padahal seharusnya dideklarasikan padahal hal itu tidak akan mengurangi kredibilitas Lembaga survey.

## ***-Vonis Menang-Kalah***

Survey politik yang dilakukan oleh lembaga survey seringkali terburu-buru atau terjebak pada diksi menang-kalah. Padahal hasil survey merupakan gambaran umum dan sebuah prediksi dari probabilitas yang masih akan terus berubah.

## **KESIMPULAN**

Berkaca pada situasi pilkada 2018 yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada hal yang tidak cukup bisa diukur oleh metode survey yaitu faktor emosi publik. Dalam komunikasi massa, factor emosional atau psikologis menjadi salahsatu hambatan dalam komunikasi massa. Sehingga pesan yang disampaikan tidak efektif atau dapat mempengaruhi preferensi politik.

Dalam beberapa kasus di pilkada 2018, faktor emosi publik secara efektif dapat berubah drastis melalui pendekatan agama seperti yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta dan pengaruh tersebut berupaya dibawa ke Pilgub Jabar. Isu partai penista agama, pendukung penista agama dan gerakan 212 mempengaruhi psikologi publik yang sangat dominan. Hal ini mendorong terbentuknya *silent majority*. Mereka merasakan sesuatu yang dipendam tapi tidak terungkapkan. Proses pemilu dimaknai sebagai bagian dari momen menunjukkan identitas diri umat beragama. Demikian sentiment publik dibangun.

Faktor lainnya yang mempengaruhi psikologi atau emosi publik sehingga menimbulkan pergeseran terhadap preferensi politik adalah faktor moral dan etika. Isu korupsi yang menerpa Ganjar Pranowo menjelang Pilgub Jateng berpengaruh pada preferensi politik masyarakat. Sehingga Sudirman Said dipandang sebagai sosok yang bersih dari isu korupsi. Dengan demikian dapat disimpulkan, hal yang dinamis dapat terus berubah dan sulit untuk diukur yakni faktor emosi publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beetham (ed). *Defining and Measuring Democracy*, London; Sage Publication Ltd, 1994.
- Ehrmann, Henry W, (edt). *Democracy In Changing Society USA*: Frederick A Preager Publishers, 1964.
- Fatah, Eep Saifullah, dalam Evaluasi Pemilu OrdeBaru, Mengapa 1996-1997 terjadi pelbagai kerusuhan? JakartaBandung; Laboratorium FISIP UI bekerjasama dengan Mizan, 1997.
- IDEA, Penilaian demoratsasi dl Indonesia, Swedia: international IDEA, Stocholm, 2000.
- Lindsey, A.D., *The Modem Democratic State*, Issued underthe auspices ofthe Royal Institute Of International Affairs, New York: AGalaxy Book, Oxford University Press, 1962.
- Mas'oed, Mohtar, *Negara, Kapital dan DemokrasI*, Yogyakarta: Pustaka Peiajar, 1994.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Perubahan*. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu